



DOK. DISDUKCAPIL KOTA YOGYA

DATA - Warga mengakses layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digulirkan Disdukcapil Kota Yogya, belum lama ini.

IKD Kerap Ditolak Instansi, Alasan Masyarakat Enggan Aktivasi

YOGYA, TRIBUN - Aktivasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Yogyakarta tampaknya masih menghadapi jalan terjal. Meski capaiannya per Senin (17/11) sudah mencapai 9,95 persen, atau sedikit di bawah target nasional 10 persen, masih banyak warga yang enggan melakukan aktivasi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, berujar, salah satu alasan keengganan warga beralih ke IKD adalah implementasi yang belum seragam di berbagai instansi pelayanan publik. Menurutnya, walaupun sosialisasi sudah gencar dilakukan, fenomena di lapangan ditemukan instansi, termasuk swasta, yang menolak penggunaan IKD.

"Kemarin ada salah satu bank, *enggak* usah saya sebutkan, salah satu bank itu menolak, dia tidak mau. Terus, ada juga rumah sakit yang tidak mau menerima IKD. Tapi, dapat

kami pastikan, di BPD (DIY), Bank Jogja, kemudian seluruh Puskesmas di Kota Yogyakarta, sudah menerima IKD dengan baik," katanya, Senin.

Sebab itu, guna menggugah kesadaran warga untuk melakukan aktivasi IKD, seluruh instansi yang berkepentingan dengan data kependudukan harus diseragamkan. Sehingga, publik pun akan sukarela melakukan aktivasi IKD, tanpa harus dipaksa-paksa oleh pemerintah. "Perlu dibuat kebijakan, edaran, atau aturan, kerja sama dengan instansi pelayanan publik lainnya. *Kabeh kudu nganggo IKD loh,* semuanya, kan begitu," tegasnya.

Ia menyebut, IKD memang dirancang untuk masa depan semua layanan publik. Jika masyarakat terus menunda aktivasinya, dikhawatirkan akan terjadi kepanikan massal. Pihaknya menganalogikan fenomena ini dengan pengurusan akta kematian. Banyak warga baru kelabakan

mengurus akta kematian saat terdesak kebutuhan waris di BPN.

Hanya saja, Disdukcapil tidak bisa memaksa warga yang tidak memiliki ponsel pintar, atau mereka yang masuk kategori lanjut usia dan gagap teknologi. Kendati demikian, Septi membocorkan, desakan untuk aktivasi IKD ke depannya bakal semakin kuat, salah satunya untuk syarat mengakses layanan bantuan sosial (bansos).

Di sisi lain, pihaknya mengundang ribuan warga sekaligus untuk aktivasi IKD massal selama November 2025, termasuk di hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Minggu (16/11) kemarin, hampir 600 orang mengakses layanan di Kantor Disdukcapil Kota Yogyakarta untuk aktivasi IKD dan rekam KTP-el. Secara keseluruhan, pihaknya mengundang sekitar 50 ribu warga yang belum aktivasi IKD, dengan skala prioritas penduduk di wilayah Kemantren Umbulharjo. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005